

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, terwujudnya keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah harus meningkatkan anggaran Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa

¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Otonomi_Daerah (Diakses pada 28 Februari 2018 jam 22.25)

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan proses pemerintahan di daerah wajib untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.² Sumber pendapatan daerah yang menjadi sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintahan daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah pada periode tertentu.

² Resianan Sukmawati, dkk, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten*, e-journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 4, 2016.

Angka Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB. Secara teori semakin besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh daerah.

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang sebelumnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah didasarkan atas kewenangan Provinsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000.

Tabel 1.1

Proporsi Belanja Modal di Provinsi Banten

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Proporsi (%)
2011	717.408.800.000	3.901.218.110.000	18.39%
2012	917.699.110.000	5.317.735.490.000	17.26%
2013	813.275.180.000	5.295.139.150.000	15.36%
2014	691.484.390.000	6.192.155.570.000	11.17%
2015	1.435.969.710.000	8.084.140.160.000	17.76%

Sumber: BPS Provinsi Banten

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah Provinsi Banten. Proporsi belanja modal terhadap belanja daerah tersebut mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan oleh belanja modal. Pada provinsi Banten, dapat dilihat bahwa proporsi belanja modal terhadap belanja daerah pada tahun 2011 sampai 2015 mengalami fluktuasi. Melihat dari proporsi selama lima tahun tersebut masih dikatakan kurang jika dilihat dari himbauan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar terus meningkatkan proporsi belanja modal hingga mencapai sebesar 30% dari belanja daerah.³

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan menggunakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan selama lima tahun dari tahun 2010 sampai 2015.

³ <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen> (diunduh 3 November 2018)

Tabel 1.2

Laju Pertumbuhan ekonomi dilihat PDRB harga konstan di Provinsi Banten

Tahun	PDRB	PDRB tahun sebelumnya	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)
2011	290.545.838.920.000	271.465.283.230.000	7.03%
2012	310.385.592.470.000	290.545.838.920.000	6.83%
2013	331.009.105.500.000	310.385.592.470.000	6.64%
2014	349.351.227.660.000	331.009.105.500.000	5.54%
2015	368.216.545.900.000	349.351.227.660.000	5.40%

Sumber: BPS Provinsi Banten

Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari PDRB harga konstan di Provinsi Banten dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami penurunan. Karena tingkat PDRB tahun sekarang memiliki selisi tahun sebelumnya. rumusan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi:

$$G = \frac{\text{PDRB}^1 - \text{PDRB}^0}{\text{PDRB}^0} \times 100\%$$

Tabel 1.3
Proporsi PAD di Provinsi Banten

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Proporsi (%)
2011	2.895.569.550.000	3.755.614.220.000	77.10%
2012	3.395.883.040.000	5.413.705.180.000	62.73%
2013	4.118.551.720.000	6.230.229.810.000	66.11%
2014	4.899.125.740.000	7.068.432.910.000	69.31%
2015	4.972.737.620.000	7.328.220.770.000	67.86%

Sumber: BPS Provinsi Banten

Pada tabel 1.3 diatas dapat dilihat proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah Provinsi Banten. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah tersebut mencerminkan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh pendapatan daerah. Pada provinsi Banten, dapat dilihat bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah pada tahun 2011 sampai 2015 mengalami fluktuasi. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah memiliki porsi yang tinggi karena lebih dari 50% disetiap tahunnya.

Tabel 1.4
Proporsi Dana Perimbangan di Provinsi Banten

Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	Porsi (%)
2011	849.490.700.000	3.755.614.220.000	22.62%
2012	1.015.105.170.000	5.413.705.180.000	18.75%
2013	1.126.007.170.000	6.230.229.810.000	18.07%
2014	1.159.872.630.000	7.068.432.910.000	16.41%
2015	976.787.590.000	7.328.220.770.000	13.33%

Sumber: BPS Provinsi Banten

Pada tabel 1.4 diatas dapat dilihat proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah Provinsi Banten. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah tersebut mencerminkan porsi dana perimbangan yang diterima oleh pendapatan daerah. Pada provinsi Banten, dapat dilihat bahwa proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah pada tahun 2011 sampai 2015 mengalami penurunan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan

APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁴

Tabel 1.5
Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah di Provinsi
Banten

Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Pendapatan Daerah	Porsi (%)
2011	10.554.080.000	3.755.614.220.000	0.28%
2012	1.002.716.970.000	5.413.705.180.000	18.52%
2013	985.673.920.000	6.230.229.810.000	15.82%
2014	1.009.434.540.000	7.068.432.910.000	14.28%
2015	1.378.695.560.000	7.328.220.770.000	18.81%

Sumber: BPS Provinsi Banten

Pada tabel 1.5 diatas dapat dilihat proporsi lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah Provinsi Banten. Proporsi lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah tersebut mencerminkan porsi lain-lain pendapatan yang sah yang diterima oleh pendapatan daerah. Pada provinsi Banten, dapat dilihat bahwa proporsi lain-lain

⁴ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*, (Penerbit Erlangga, 2014), 77.

pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah pada tahun 2011 sampai 2015 mengalami fluktuasi.

Berdasarkan uraian data diatas dimana pertumbuhan ekonomi dan sumber pendapatan daerah yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal. Dengan Judul “**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal Di Banten Tahun 2011-2015**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal Di Banten.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, Dana

Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal Di Banten. Dengan digambarkan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Data penelitian yang digunakan diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka timbul beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal di Banten Tahun 2011-2015?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal di Banten Tahun 2011-2015?
3. Apakah Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal di Banten Tahun 2011-2015?
4. Apakah Lain-Lain Pendapatan yang Sah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal di Banten Tahun 2011-2015?

E. Tujuan Penelitian

Dilihat dari perumusan masalah di atas maka tujuan dari penulis membahas penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Banten Tahun 2011-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Banten Tahun 2011-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Banten Tahun 2011-2015.
4. Untuk mengetahui pengaruh Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal di Banten Tahun 2011-2015.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan kemampuan tentang pengelolaan data serta menjadi sarana untuk pengembangan berfikir secara ilmiah dan rasional.

2. Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

3. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi penelitian dikemudian hari dan untuk menambah pengetahuan dibidang ekonomi.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 tahun 2011, Belanja Modal (*Capital expenditure*) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas.⁵ Belanja yang bersumber

⁵ Resianan Sukmawati, dkk, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten*, e-journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 4, 2016.

dari belanja modal akan menjadi aset milik daerah yang perlu dicatat dengan benar, berfungsi dengan baik, dan diharapkan akan berdampak pada *outcome*, *impack* dan benefit yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas sebagai aset yang dapat memacu kesejahteraan rakyat.⁶

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah pada periode tertentu. Angka Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun yang bersangkutan. Secara teori semakin besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh daerah. Dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik.

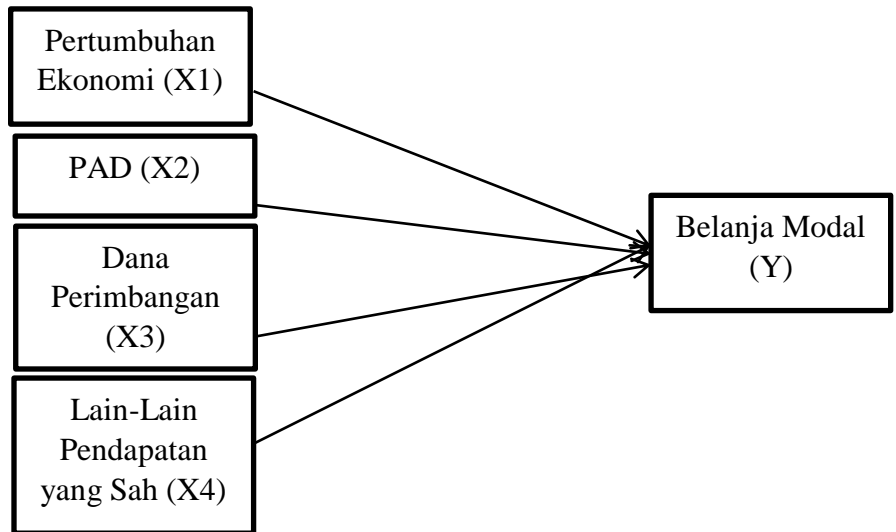
⁶ M Yusuf, 8 *Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintah dan Pemerintahan Daerah*, (Salemba Empat, 2011), 83.

Sumber pendapatan daerah yang menjadi Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu modal dasar dalam mendapatkan dana pembangunan dan pemenuhan belanja daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁷ Dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber lain, misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintahan daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diduga terdapat hubungan antara Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada

⁷ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3, ...*, 77.

Pemerintahan Daerah Provinsi Banten, berikut konsep kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1.1

Model Penelitian

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab dan bagian yaitu:

BAB Ke-satu Pendahuluan, Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka pemikiran serta Sistematika pembahasan.

BAB Ke-dua Tinjauan Pustaka, Pada bab ini penulis membahas tentang teori-teori serta kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah.

BAB Ke-tiga Objek dan Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan tentang Ruang Lingkup Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Metode Penelitian, Jenis-jenis Data, Teknik Pengumpulan dan Teknik Analisis Data, dan Operasional Variabel Penelitian.

BAB Ke-empat Analisis Data dan Pembahasan Penelitian, Bab ini membahas tentang uraian hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penulisan yang telah dilakukan dengan disertai pembahasan yang terpadu.

BAB Ke-lima Penutup, Bab ini membahas kesimpulan penulisan mengenai objek yang telah diteliti berdasarkan data dan memberikan saran untuk pihak-pihak terkait.